

## KAJIAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTI DIMENSI DI KOTA PADANG (FAKTOR EKSTERNAL KEMISKINAN NELAYAN)

<sup>1</sup>Junaidi, <sup>2</sup>Abdullah Munzir, <sup>3</sup>Uning Pratimaratri

<sup>1,2</sup> Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, <sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Jl. Sumatera Ulak Karang Padang

e-mail: <sup>1</sup>dr\_st\_junaidi@yahoo.co.id, <sup>2</sup>almunzir11@yahoo.co.id, <sup>3</sup>pratimaratri2003@yahoo.com

*Abstract.* This study aimed to examine the external factors of poverty fishermen in the city of Padang in poverty alleviation efforts of fishermen in terms of multi-dimensional perspective. External factors include: the Ministry of Maritime and Fisheries Policies, Policy Department of Marine West Sumatra province, the city of Padang, The Role of Fishery Port Bungus, TPI and PPI Role, Role Fisheries Company (PT.Dempo), The Role of Fisheries Exporter, Restaurants and Eating Roles, Role SMEs, and the Role of Institutions of Higher Education. The method used is: survey method. The data were analyzed descriptively qualitative. From the results of this study concluded that: (1) Assistance to fishermen still needed. (2) There is no cutting aid from the APBN and APBD. (3) There is no system of monitoring and evaluation assistance. (4) Nusantara Fishery Port Bungus not actively involved. (5) Fishermen can not meet the needs of fishery product processing company. (6) Infrastructure TPI still need dilengkap. (7) It is necessary to evaluate the system of export order to be able to faster process by using better technology, so that the process can be faster delivery. (8) Improved quality restaurants and eating houses in terms of food quality and menu variety continue to be a culinary tourist center of Padang. (9) Higher education cooperation LSP-KP to deliver the diploma companion in the form of certificates of competency for students, students, communities, and fisheries extension.

**Keywords:** external, poverty, fishermen, policy.

*Abstrak.* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor eksternal kemiskinan nelayan di Kota Padang dalam upaya pengentasan kemiskinan nelayan ditinjau dari perspektif multi dimensi. Faktor eksternal meliputi: Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Dinas kelautan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Peranan Pelabuhan Perikanan Bungus, Peranan TPI dan PPI, Peranan Perusahaan Perikanan (PT.Dempo), Peranan Ekspor Perikanan, Peran Restoran dan Rumah Makan, Peranan UKM, dan Peran Lembaga Pendidikan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah: Metode survey. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bantuan untuk nelayan masih diperlukan. (2) Masih ada pemotongan bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD. (3) Belum ada sistim monitoring evaluasi bantuan. (4) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus belum berperan secara maksimal. (5) Nelayan belum bisa memenuhi kebutuhan perusahaan pengolahan hasil perikanan. (6) Infrastruktur TPI masih perlu dilengkap. (7) Perlu dilakukan evaluasi sistem ekspor agar dapat prosesnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, sehingga proses pengiriman dapat lebih cepat. (8) Peningkatan kualitas restoran dan rumah makan dari segi mutu makanan dan keanekaragaman menu terus dilakukan agar menjadi pusat wisata kuliner Kota Padang. (9) Perguruan tinggi kerjasama LSP-KP untuk memberikan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi mahasiswa, siswa, masyarakat, dan penyuluh perikanan.

**Kata kunci:** eksternal, kemiskinan, nelayan, kebijakan.

## 1. Latar Belakang Permasalahan

Jumlah nelayan di Kota Padang sebanyak 5.856 orang, terdiri atas 2.472 orang nelayan tradisional, tergolong nelayan miskin. Nelayan merupakan asset strategis yang perlu diberdayakan agar dia dapat keluar dari kemiskinan. Berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan seperti: bantuan alat dan kapal perikanan, dan mesin kapal/perahu dimulai dari tahun 1980, dana bergulir dimulai pada tahun 1990, bantuan Modal Kerja Masyarakat Pesisir (MKPEMP) di tahun 2000, serta program gerakan pensejahteraan masyarakat pesisir (GEPEMP) yang diprakarsai oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat di tahun 2012. Berbagai bantuan telah diluncurkan oleh pemerintah, namun kehidupan masyarakat nelayan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berbagai kajian telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan namun masih bersifat parsial.

Dorongan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di sektor perikanan telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti: Pelabuhan Samudera Bungus, Pembangunan Industri Perikanan PT. Dempo, dan Fasilitas lainnya seperti PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun geliat tersebut masih belum kelihatan. Oleh karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan terpusat, maka sangat perlu dilakukan penelitian strategi pengentasan kemiskinan dengan perspektif multi dimensi di Kota Padang.

## 2. Tinjauan Pustaka

Sangat ironis sekali Negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumberhayati terbesar di dunia namun masyarakat nelayan yang tinggal dikawasan pesisir, merupakan masyarakat termiskin. Inilah yang menjadi pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Hasil penelitian Junaidi (1991) dan (2008) menunjukkan bahwa Tempat Pelelangan ikan hanya untuk memungut retribusi saja. Paket bantuan alat tangkap diberikan tapi terkendala oleh pemasaran hasil tangkapan. Junaidi (1992) teknologi alat tangkap ditingkatkan menggunakan pukat cincin (purse seine) terkendala oleh pemasaran dan infrastruktur. Selanjutnya Junaidi (1994) faktor penyebab kemiskinan nelayan adalah pola hidup, jumlah tanggungan yang banyak, tidak ada bantuan, struktur yang menyebabkan mereka miskin. Lebih lanjut Junaidi (2005) faktor penyebab kemiskinan adalah agen yang mempermainkan harga dan adanya ketidak jujuran dalam transaksi. Lebih lanjut Suarta (2013) melihat kemiskinan dari segi faktor internal dan eksternal, Arsyad (2007) melihat kemiskinan dari segi usaha yang dilakukan masyarakat nelayan, Natalia, M dan Alie, M.M (2014) meneliti kemiskinan dari aspek sumberdaya manusia, infrastruktur dan kepemilikan modal. Disisi lain penelitian Oladimeji, Y.U *et al* (2014), Zein (1998), nelayan harus didik memahami teknologi, sementara itu Elfindri (2002), dan Nikijulu (2006), Hariansyah (2013) nelayan perlu diberdayakan hal ini menyangkut kelimpahan hasil di waktu musim ikan menyebabkan harga turun, kehidupan nelayan semakin sulit. Selanjutnya Hasanuddin *et al* (2013) mengemukakan bahwa pemberian bantuan kepada nelayan miskin tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Peneliti lain seperti Ustman (2007), Islam (2006), De Jainvry and Sadoulet (2000), dan Ellis (2000), mengemukakan bahwa umumnya nelayan tidak memiliki asset. Lebih lanjut Sunoto (2012) mengemukakan bahwa perlu adanya industrialisasi kelautan, Nazmar (2013) nelayan perlu diberdayakan untuk

meningkatkan ekonominya, Saidan (1998) wanita nelayan perlu berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Junaidi (2012) wanita nelayan berperan aktif meningkatkan ekonomi keluarga sebagai pengolah namun terkendala oleh kemasan dan labelling produk. Akbarini, Gumilar, dan Garandiosa (2012) istri nelayan menyumbang 31,32% untuk ekonomi keluarga. Pelabuhan perikanan sebagai sarana untuk memuat dan mendaratkan ikan tidak berfungsi dengan baik Silaen, Zein, Junaidi (2010). Lebih lanjut Elfindri (2007), Bank Dunia (2003), tidak tercapainya implementasi program disebabkan adanya korupsi dan nepotisme, oleh karena itu untuk nelayan miskin pembangunan di Indonesia belum memberikan pondasi yang kuat (Pritchett et al (2000), World Bank (2003), Elfindri dan Saputra (2005), dan Sapu

### **3. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun dengan tujuan : Apakah bantuan selama ini tidak memberikan manfaat terhadap kehidupan nelayan, dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tidak memberi manfaat terhadap hasil tangkapan mereka, serta faktor-faktor tidak termanfaatkannya semua sarana dan prasarana perikanan yang menyebabkan mereka sulit keluar dari kemiskinan atau semua faktor eksternal yang menyebabkan mereka tetap miskin. Faktor eksternal ini juga melihat peran stakeholder dalam mengembangkan sektor perikanan yang terdiri dari kebijakan pemerintah, peranan swasta dalam hal ini adalah industry perikanan, para eksportir, masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga penghasil lulusan bidang perikanan, peneliti, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Akhir dari hasil penelitian eksternal adalah diperoleh strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dalam mengevaluasi program yang telah dilakukan sebelumnya.

### **4. Metode Penelitian**

#### **4.1 Populasi**

Populasi dalam kajian ini adalah kumpulan para individu pembuat kebijakan baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta (Dirjen Perikanan Tangkap), Provinsi dan Kota Padang, Manajer PT. Dempo, Ketua UKM Provinsi dan Kota Padang, Kepala TPI/PPI Kota Padang, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Eksportir, dan pedagang, serta restoran, dan Dekan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta Padang.

#### **4.2 Sampel**

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah : 54 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Sampel**

No	Instansi	Jumlah (orang)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6
2	Dinas Perikanan Provinsi	3
3	Dinas Perikanan Kota Padang	3
4	PT. Dempo	2
5	UKM	10
6	TPI/PPI	5
7	Pelabuhan Perikanan Bungus	6
8	Eksportir/Pedagang ikan	7
9	Restoran	10
10	Perguruan Tinggi	2
		54

#### 4.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer dengan wawancarai 54 responden untuk menggali informasi tentang peran masing-masing stakeholder tersebut.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai informasi kepustakaan dan dokumen, serta informasi media elektronik tentang kemiskinan nelayan.

#### 4.4 Teknik Analisis data

1. Data-data yang dikumpulkan melalui kuisioner dikumpulkan dan dicatat dan dianalisis dengan menggunakan tabel dan gambar-gambar serta dilakukan pemaparan secara persentase dan rata-rata. Dari gambaran ini dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan faktor penyebab kemiskinan nelayan secara eksternal.
2. Data-data yang dikumpulkan melalui kepustakaan dan dokumen-dokumen digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan membandingkan hasil-hasil yang telah dilakukan kajian faktor-faktor kemiskinan sebelumnya dan perbedaan temuan yang dilakukan serta langkah-langkah pemecahan penyebab kemiskinan nelayan kedepannya.

### 5. Hasil Penelitian

Program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan tradisional telah banyak dilakukan baik berupa bantuan kapal perikanan, alat tangkap, dan program pensejahteraan melalui program bantuan tunai untuk operasional penangkapan melalui kelompok nelayan. Program-program tersebut digulirkan melalui dana APBN dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Proses pengaliran dana tersebut melalui persetujuan DPR Pusat, setelah proses persetujuan maka KKP melakukan penyaluran ke berbagai provinsi yang memerlukan bantuan tersebut. Bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari KKP Pusat melalui kelompok nelayan yang telah dibentuk secara kelompok oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum bantuan diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Pembentukan kelompok nelayan penerima bantuan
2. Pelatihan Kelompok Nelayan penerima bantuan

3. Sosialisasi aturan dan tatacara pengguna anggaran dan pelaporan
4. Serah terima bantuan oleh KKP pusat kepada Nelayan Penerima Bantuan
5. Monitoring pelaksanaan dan hasil serta pelaporan oleh penerima Bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
6. Yang tidak pernah dilakukan adalah evaluasi tingkat keberhasilan dan dampak bantuan terhadap nelayan

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kota Padang telah menyerahkan bantuan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga berlaku, dimana evaluasi keberhasilan bantuan tidak pernah dilakukan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak berfungsi secara optimal, aktifitas bongkar muat masih dilakukan oleh para nelayan yang memiliki kapal-kapal dengan ukuran 30 GT yang mereka berasal dari nelayan bungus sendiri, namun nelayan di Kota Padang tetap mendaratkan hasil tangkapannya di muara padang. Sekalipun pada saat ini pelabuhan bungus telah membangun kios sebanyak 30 unit, dalam upaya menyediakan sarana melaut seperti alat tangkap dan perbekalan untuk melaut. Namun dari 30 unit kios tersebut hanya beberapa kios saja yang beroperasi disebabkan tidak banyak nelayan yang menyinggahi pelabuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan meneger dan staf di perusahaan perikanan PT. Dempo bahwa keberadaan perusahaan perikanan ini yang didirikan pada tahun 2007 belum membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan tradisional di Kota Padang khususnya. Hal ini disebabkan PT. Dempo tidak pernah membeli hasil tangkapan dari nelayan tradisional. Salah satu alasan mereka adalah : PT. Dempo hanya melakukan ekspor ikan tuna ke Jepang dan Amerika. Sekalipun mereka juga memproduksi ikan olahan berupa nugged, bakso ikan, risoles, steak, otak-otak, serta daging ikan tuna. Semua produk yang mereka hasilkan tetap berhubungan dengan ikan tuna, sehingga mereka tidak pernah membeli ikan jenis lain selain ikan tuna. PT. Dempo juga membeli ikan tuna dari para nelayan dengan standar mutu yang telah mereka tetapkan, khususnya ikan tuna dari alat tangkap pancing tonda. Pada tahun 2008 PT. Dempo telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan dalam upaya membeli hasil tangkapan mereka, namun respon nelayan tidak seperti yang diharapkan.

TPI batang arau terletak di muara Kota Padang dengan kapasitas produksi yang di daratkan nelayan tradisional per hari  $\pm 7$  ton. Menurut keterangan pengelola TPI Bapak wan, edi, dan anis, TPI ini dikelola secara pribadi dengan anggota nelayan yang mereka miliki masing-masing. wawancara dengan TPI KUD Mina Gates dengan kapasitas produksi yang dilelang  $\pm 30$  ton/hari. KUD Mina Gates dikelola oleh Koperasi dengan beranggotakan 110 orang anggota. Simpanan wajib anggota adalah Rp. 100.000,- dan sumbangan sukarela Rp. 10.000,-. Jumlah agen yang terlibat di TPI KUD Gates ini sebanyak 10 orang. Pemasaran ikan dari TPI KUD Gates ini sampai ke luar daerah seperti: Jambi, Pekanbaru, dan Pariaman, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Namun kelemahan dari TPI KUD Mina Gates ini adalah tidak adanya fasilitas Cold Storage, ES batang, parkir yang terbatas. Lingkungan TPI ini sangat kotor dan penuh dengan sampah di sekitar TPI KUD Mina Gates. Peran TPI sangatlah fital bagi masyarakat nelayan dan dari segi manfaat sangat bermanfaat, namun fasilitas tidak memadai dari segi luas, dan sarana pendukung lainnya yang terbatas. Sangat eronis TPI Muara Anai dibangun dengan dana 30 Milyar, dengan fasilitas yang sangat lengkap dengan pabrik esnya dengan omset 2,5 milyar/tahun. Namun manfaatnya bagi nelayan tidak dapat dirasakan, hal ini disebabkan fasilitas tersebut tidak dapat dilalui oleh kapal

dan perahu nelayan disebabkan pendangkalan muara anai tersebut. TPI sepi dan tidak ada aktifitas nelayan di TPI tersebut sekalipun didanai oleh dana APBN.

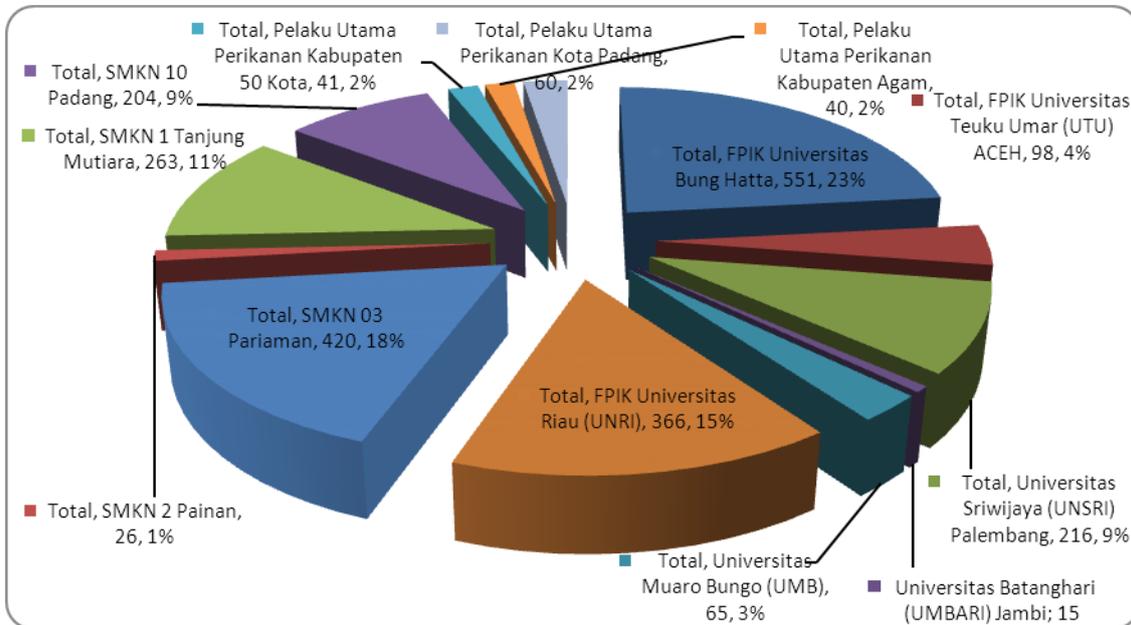
Berdasarkan hasil wawancara dengan eksportir mengemukakan bahwa ada beberapa komoditi yang di ekspor ke singapore seperti: tripang, lobster, dan kepiting. Cara eksportir memperoleh komoditi tersebut adalah nelayan langsung yang mengantarkan kepada eksportir. Berdasarkan peraturan menteri perikanan dan kelautan No. 1/PERMEN-KP/2015 bahwa ekspor hasil tersebut harus memenuhi ukuran yang telah ditentukan. Lobster tidak boleh di ekspor dalam keadaan bertelur, berat lobster yang boleh di ekspor minimal memiliki berat 0,5 kg/ekor. Hal yang sama juga berlaku untuk kepiting. Untuk lobster dan kepiting harga per kilogram dibeli oleh eksportir adalah Rp. 250.000/kg, dan untuk teripang dibeli dengan harga Rp. 1.250.000/kg. Dalam proses pengiriman harus melalui karantina di bandara Internasional Minang Kabau, untuk komoditi lobster dan kepiting proses di karantina memerlukan waktu 4 hari, dan teripang memerlukan waktu 14 hari di karantina. Keluhan eksportir dalam mengekspor lobster dan kepiting adalah: setelah komoditi siap di ekspor dan telah melalui karantina, namun setelah sampai di bandara disuruh bongkar kembali, hal ini yang menyebabkan keluhan dari para eksportir.

Peran restoran dan rumah makan dalam menyerap hasil tangkapan nelayan tradisional di Kota Padang sangatlah diharapkan oleh para nelayan. Tumbuhnya gerai-gerai makanan yang menawarkan ikan segar sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya. Khusus untuk masyarakat Kota Padang sudah akrab dengan warung-warung makan "lauk pukek" yang uaca yang tidatumbuh dan berkembang di kawasan wilayah pesisir Kota Padang, seperti Lauk Pukek Mak Apuak, Lauk pukek Supik, warung Lauk Pukek Palanta Bundo dan lainnya. Sementara untuk kawasan wisata Pantai Padang tumbuh restoran-restoran yang menawarkan ikan bakar yang diperoleh dari nelayan pancing seperti : Ikan Bakar Fuja, Unang Rindu, Pondok Ikan Bakar, Rumah makan ampera 99 dll. Semua ini merupakan prospek yang sangat baik untuk berkembangnya wisata kuliner di Kota Padang. Rata-rata restoran dan rumah makan ini telah memiliki nelayan pencari ikan sebagai langganan untuk memperoleh bahan baku untuk restoran dan rumah makan mereka. Persoalan yang timbul bagi rumah makan dan restoran ini adalah jika tidak musim ikan dan adanya cuaca yang kurang baik atau badai, maka usaha mereka juga terkendala. Pada saat tidak musim ikan bahan baku untuk warung dan rumah makan menjadi mahal. Sementara harga jual tidak mengalami kenaikan. Untuk restoran di kawasan Pantai Padang kandang-kandang memperoleh bahan baku ikan bakar dari kepulauan mentawai. Secara umum dapat digambarkan bahwa peran restoran dan rumah makan ini sangat membantu para nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan mereka.

Permasalahan yang timbul dibidang pengolahan ini adalah kontinuitas bahan baku yang selalu kekurangan. Hal ini disebabkan oleh musim ikan yang selalu berfluktuasi. Permintaan dari konsumen cukup tinggi dibidang pengolahan ini, namun terkendala oleh bahan baku yang kurang. Sumber bahan baku berasal dari hasil tangkapan bagan, payang, dan pukat tepi. Dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pengolahan hasil perikanan sangat tinggi sehingga outlet untuk pemasaran telah disediakan, begitu juga pakaging dan lebeling dari produk olahan telah disediakan. Diharapkan kedepan pengolahan hasil perikanan semakin tinggi, khususnya permintaan dari luar provinsi disebabkan cita rasanya yang enak dan penuh gizi.

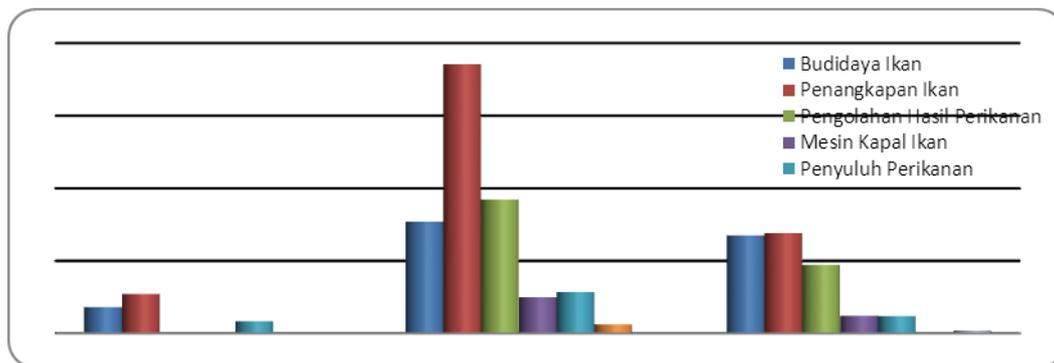
Peran perguruan tinggi semakin meningkat dengan adanya LSP-KP memprogramkan bahwa setiap mahasiswa, siswa, masyarakat, dan penyuluh harus

memiliki sertifikat kompetensi. Fakultas Perikanan Univ. Bung Hatta telah berperan dalam upaya percepatan tersebut dan telah ditunjuk FPIK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Jumlah peserta per instansi dan peserta di TUK Fpik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1

**Jumlah Peserta Per Isntansi dan Peserta di TUK Fpik**



Gambar 2

**Diagram Batang dari Jumlah Peserta Per Isntansi dan Peserta di TUK Fpik**

**6. Kesimpulan dan Saran**

1. Bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap, perahu, dan mesin terus dilanjutkan agar jumlah nelayan miskin dapat dikurangkan.
2. Bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD jangan dipotong sehingga jumlah penerima dapat ditingkatkan
3. Perlu dilakukan evaluasi setelah bantuan tersebut digulirkan sehingga dampak bantuan dapat terlihat

4. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus perlu ditingkat, baik dari segi pelayan dan jasa lainnya.
5. Diharapkan PT. Dempo kedepan dapat membeli hasil tangkapan nelayan tradisional untuk diolah menjadi produk lokal seperti: Nuget, stick, bakso, risoles, dan otak-otak.
6. Infrastruktur TPI perlu dilengkapi untuk kebutuhan nelayan dalam menangani ikan hasil tangkapan mereka, fasilitas parkir, dan cold storage, serta kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan.
7. Perlu dilakukan evaluasi sistem ekspor agar dapat prosesnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, sehingga proses pengiriman dapat lebih cepat
8. Peningkatan kualitas restoran dan rumah makan dari segi mutu makanan dan keanekaragaman menu terus dilakukan agar menjadi pusat wisata kuliner Kota Padang
9. Kekurangan bahan baku untuk produk pengolahan dapat dilakukan dengan cara peningkatan jumlah alat tangkap, kualitas lingkungan dan sumberdaya dengan menjaga dari sampah dan zat berbahaya lainnya.
10. Peran perguruan tinggi terus ditingkatkan dengan kerjasama LSP-KP untuk memberikan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi mahasiswa, siswa, masyarakat, dan penyuluh perikanan.

#### **Saran**

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun sitem monitoring dan evaluasi bantuan dan program yang diberikan
2. Pelabuhan perlu membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan air bersih
3. TPI dan PPI perlu ditingkatkan infrastruktur untuk menunjang aktifitas bongkar dan muat hasil tangkapan
4. TPI dan PPI yang belum berfungsi disebabkan pendangkalan agar segera dilakukan pengerukan dalam rangka melancarkan arus masuk dan keluar kapal dan perahu
5. Membangun sistem pelayanan yang baku agar proses ekspor dapat lebih cepat

#### **Daftar pustaka**

- Akbarini, T.U, Gumilar, I, dan Grandiosa, R (2012) Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan di Pangandaran, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Perikanan dan Kelutan*. Vol, 3, No.3 September 2012, 127-136.
- De Janvry, A, and Sadoulet, A (2000). Rural poverty in Latin America: Determinants and exit Paths. “*Food Policy* 25 (4): 389-409.
- Elfindri (2002). *Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang Andalas University Press.
- .....(2007) Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan: Desain dan Implementasi. *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol 1, No. 3 Desember 2007. 1-18.
- Elfindri dan Saputra, W (2005), Kemiskinan dan Startegi Penyesuaian: Studi Empiris Sumatera Barat dengan Data Susenas 1999 dan 2003, *Jurnal Ekonomi Indonesia* No.2 Desember 2005.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford, Oxford University Press.
- Hasanuddin, N.L, Noor, N, Santosa, H.R .2013. Is it possible to eradicate poverty in the fishermen village ? Laboratory for Housing and Human Settlement, Department of Architecture, ITS. *international journal of environmental sciences* volume 4, no 2, 2013.

- Hariansyah, R. 2013. strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi nelayan miskin di desa lubuk kecamatan kundur kabupaten karimun) Tanjung Pinang.
- Islam, M. R. 2006. Managing Diverse Land Uses in Coastal Bangladesh: Institutional Approaches . In *Environment and Livelihoods in Tropical Coastal Zones*, eds. C. T. Hoanh, T. P. Tuong, J. W. Growing and B. Hardy, 237-248. CAB International.
- Junaidi (1991). Tempat Pelelangan Ikan Masalah dan Pengembangannya di Kota Padang.
- .....(1992). Dampak Bantuan Paket Teknologi Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Tradisional di Kepulauan Mentawai (Studi Kasus di Desa Malilimok Kec. Siberut Selatan Kab. Padang Pariaman
- ..... (1992). Dampak Teknologi Terhadap Effisiensi Usaha Perikanan dengan Purse Seine di Air Bangis Kec. Sei. Beremas Kab. Pasaman
- ..... (1994). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional Studi Kasus di Dua Desa Pantai Kec. Sei. Limau Kab. Padang Pariaman.
- ..... (2005). Kointegrasi Harga Pasaran Tuna di Sumatera Barat, Indonesia.
- ..... (2008). The Implementation of Auction System on The Price of Tuna Fish in West Sumatera. International Conference 2008 on Quantitative Method Used in Economic and Business at University Malahayaty Lampung.
- ..... (2012). Marine Product Processing Industries of West Sumatera Expectations and Challenges in Global Marketing. At The International Conference On Competitiveness of Economy In The Global Market (ICCE).
- Natalia, M dan Alie, M.M. 2014. kajian kemiskinan pesisir di kota semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). *Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014*.
- Nazmar (2013). Model Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dengan Pengembangan Off-Fishing di Kota Padang. Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Pemasaran Pembangunan Pertanian. Program Pascasarjana. Universitas Andalas Padang.
- Nikijulu, V.P.H (2006). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor Tanggal 29 Oktober 2006.
- Oladimeji, Y.U et al. 2014. determinants of poverty among rural artisanal fishery households in kwara state, nigeria . *Journal of Sustainable Development in Africa (Volume 16, No.3, 2014) ISSN: 1520-5509*.
- Pritchett, Suryadi, Sumarto, (2000), Safety Net and Safety Nets: Comparing the Dynamics Benefit Incidence of Two Indonesia "JPS" Programs, Jakarta: SMERU Research Institute.
- Purnomo, G, S. 2005. Strategi Bertahan Hidup: Respons Nelayan terhadap Perubahan Kondisi Daerah Penangkapan Ikan di Selat Madura. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.
- Saidan, C (1998). Peranan Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat di Kelurahan Miskin Kota Padang. (Studi Kasus Kelurahan Sei. Pisang Kec. Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Pasir Ulak Karang Kec. Padang Utara). Tesis Pascasarjana Unand. Tidak di Publikasikan.
- Silaen, N, Zein, A, dan Junaidi (2010), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Nelayan Tonda Dalam Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Tesis Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- Suartha, N. 2013. Pengaruh kapasitas rumah tangga, budaya dan pemberdayaan terhadap sikap serta keberdayaan rumah tangga miskin di kabupaten karangasem nyoman suartha program pascasarjana universitas udayana Denpasar 2013.
- Sunoto (2012). Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dan Blue Ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 Desember 2012.
- Ustman, S (2007) Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- World Bank (2003), Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia, Urban Development Working Papers No. 7.
- Zein, A (1998). The Influence of Technological Change on Income and Social Structure in Artisanal Fisheries in Padang, Indonesia. Dissertation. Centre for Tropical Marine Ecology University of Bremen, Germany.
- Zein, L, W (2008) Analisis Kontribusi Pendapatan Wanita Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Mangrove dan Pesisir IX (1), Februari 2009: 12-17 ISSN: 1411-0679*.